

Pendidikan Politik Kaum Milenial di Era Digital: Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan Literasi

Saryono^{1*}, Isep Sunandi², Dede³

¹STKIP Kusumanegara, Indonesia

²Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Indonesia

³Institut Bakti Nusantara, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pendidikan politik kaum milenial di Indonesia pada era digital, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan strategi penguatan literasi digital. Generasi milenial, sebagai pengguna aktif media sosial dan teknologi digital, memiliki akses luas terhadap informasi politik serta kesempatan berpartisipasi secara langsung dalam diskusi dan kampanye politik daring. Era digital membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, cepat, dan dinamis, namun juga menghadirkan risiko seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan ketergantungan pada sumber informasi yang tidak terverifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk mengidentifikasi dampak media digital terhadap pola pembelajaran politik, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik milenial, serta rekomendasi peningkatan pendidikan politik. Hasil kajian menunjukkan perlunya integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran politik interaktif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil, serta kampanye publik yang mendorong keterlibatan politik yang sehat. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi milenial yang kritis, melek informasi, dan aktif dalam proses demokrasi.

Article Info

Article history:

Dikirim Feb 14, 2024

Direvisi Sep 4, 2024

Diterima Oct 7, 2024

Keyword:

Era digital,
Milenial,
Literasi digital,
Partisipasi politik,
Pendidikan politik.

©2025 PKR

Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



Corresponding Author:

Saryono

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Kusumanegara
Jl. Raya Bogor KM-24 Cijantung Jakarta Timur, Indonesia.

Email: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

^{1*}Corresponding author.

E-mail: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

PENDAHULUAN

Hampir setiap aspek kehidupan manusia telah berubah karena era komputer dan internet, termasuk cara generasi muda berinteraksi dengan politik. Generasi milenial, seperti yang Chan (2023) uraikan pada penelitiannya, terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1980 dan 1995, adalah generasi pertama yang tumbuh dengan teknologi digital dan juga menjadi pengguna aktif dan inovatif dari berbagai platform digital. Mereka adalah pemimpin dalam komunikasi, penyebaran informasi, dan keterlibatan dalam proses politik melalui teknologi yang tidak pernah ada sebelumnya. Mengingat populasi muda yang besar dan pertumbuhan teknologi yang pesat, transformasi ini sangat penting di Indonesia.

Milenial sekarang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mencakup internet, media sosial, aplikasi mobile, dan alat komunikasi digital lainnya. Valenzuela (2021) mengatakan akses cepat dan mudah ke informasi politik melalui media sosial telah mengubah cara orang memahami masalah politik, berpartisipasi dalam debat, dan memengaruhi keputusan politik. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok bukan hanya saluran informasi, mereka juga menjadi tempat penting untuk diskusi, mobilisasi massa, dan kampanye politik. Kaum milenial tidak hanya dapat mengakses berita terbaru tetapi juga dapat terlibat langsung dalam proses politik dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis melalui platform ini (Ida, 2020). Fenomena ini berdampak besar di Indonesia. Teknologi digital dan media sosial telah mengubah lanskap politik dengan membawa partisipasi politik baru dan mendorong gerakan sosial yang signifikan. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik, mobilisasi massa untuk gerakan sosial, dan penyebaran informasi politik melalui aplikasi ponsel adalah contoh nyata. Kaum milenial memiliki kemampuan untuk dengan cepat mengorganisasi dan menggerakkan aksi sosial, mengumpulkan dukungan dari seluruh dunia, dan memengaruhi kebijakan publik melalui gerakan seperti #ReformasiDikorupsi (Sahara, 2021).

Perubahan ini, bagaimanapun, datang dengan sejumlah masalah. Meskipun teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi politik, ia juga membawa risiko seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks, polarisasi pendapat (M. Chan, 2021), dan ketergantungan pada sumber informasi yang tidak dapat diandalkan. Meskipun berguna, media sosial seringkali menjadi tempat untuk disinformasi, berita yang menyesatkan, dan konten yang tidak akurat (Theocharis, 2023). Algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai dengan preferensi pengguna dapat menyebabkan polarisasi opini, yang dapat meningkatkan ketegangan politik dan mengurangi keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda. Selain itu, bergantung pada media sosial sebagai sumber utama informasi politik dapat mengabaikan informasi yang penting tentang pemerintah. Indonesia membutuhkan perhatian khusus untuk masalah ini. Meskipun kaum milenial Indonesia sangat menggunakan teknologi, pendidikan politik formal seringkali tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh era digital. Kurikulum pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi seringkali ketinggalan zaman dan tidak mencakup aspek-aspek digital yang relevan. Ini berarti generasi muda harus mencari informasi politik secara mandiri, seringkali melalui media yang tidak dapat diandalkan.

Dengan memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana teknologi digital membentuk pandangan politik dan keterlibatan generasi muda, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak era digital terhadap pendidikan politik kaum milenial di Indonesia. Selain itu, penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pendidikan politik di era digital, seperti literasi digital, penyebaran informasi palsu, dan polarisasi opini. Rekomendasi strategis akan diberikan untuk meningkatkan pendidikan politik dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, mengatasi masalah yang ada, dan mempersiapkan kaum milenial untuk menjadi peserta aktif dan informatif dalam proses politik. Dengan memahami bagaimana pendidikan politik dan teknologi digital berinteraksi, diharapkan dapat dikembangkan metode yang lebih efisien untuk mempersiapkan generasi milenial untuk menghadapi tantangan politik yang akan datang, serta untuk menciptakan budaya politik yang lebih sehat dan partisipatif di Indonesia. Gaffar (2006) mengatakan bahwa proses pendidikan politik menghasilkan budaya politik, dengan pendidikan politik, orang-orang akan menerima norma, keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang ditransmisikan melalui berbagai sumber, termasuk keluarga, saudara, teman, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pendidikan politik kaum milenial di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika sosial, peluang, dan tantangan yang dihadapi generasi milenial dalam mengakses, memproses, dan memanfaatkan informasi politik melalui media digital.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dengan menelaah sumber-sumber ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi daring yang relevan dengan topik pendidikan politik, literasi digital, dan partisipasi politik kaum muda. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan lembaga resmi, publikasi media massa, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait pendidikan politik dan perkembangan teknologi digital.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah: (1) mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan tema; (2) mengidentifikasi pola, tren, dan keterkaitan antara pendidikan politik dan media digital; (3) menafsirkan temuan dalam kerangka teori literasi digital dan partisipasi politik; serta (4) menyusun rekomendasi strategis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, membandingkan berbagai referensi untuk memastikan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Era Digital terhadap Pendidikan Politik

Era digital membawa perubahan signifikan pada cara generasi milenial mengakses dan mempelajari isu politik. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi sarana utama memperoleh informasi sekaligus ruang diskusi dan mobilisasi aksi politik. Milenial kini dapat mengikuti berita politik secara real time, berpartisipasi dalam kampanye digital, dan mempengaruhi kebijakan publik

melalui petisi daring dan gerakan sosial, seperti #ReformasiDikorupsi. Namun, kemudahan akses ini disertai risiko penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan filter bubble yang membatasi paparan pandangan berbeda.

Usaha mempertahankan sistem yang sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem nilai politik (politik, budaya, ideologi, pola keyakinan) merupakan proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis yang ada pada diri manusia, yaitu sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan, unsur indriatif, dan unsur-unsur instingtif yang diarahkan pada suatu objek tertentu (kondisi pelestarian) agar objek tersebut dapat didekati. Proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis tersebut dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam lingkup kajian ilmu komunikasi, pendidikan merupakan salah satu bentuk spesialisasi selain propaganda, jurnalistik, public relations, dan sebagainya. Pendidikan sebagai aktivitas memengaruhi, mengubah, dan membentuk sikap serta perilaku didasarkan pada nilai-nilai yang telah dianggap benar dan memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia (Anggara, 2013). Pendidikan politik di Indonesia telah mengalami transformasi besar karena era digital, terutama di kalangan kaum milenial. Salah satu efek utamanya adalah kemudahan mendapatkan informasi. Generasi milenial dapat dengan mudah dan cepat mengakses berita politik dari berbagai sumber lokal dan internasional melalui internet. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram menjadi sarana penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi terbaru dan berinteraksi dengan berita politik. Selain itu, situs web berita dan blog politik menyediakan analisis mendalam yang sulit ditemukan di media konvensional, sementara platform seperti YouTube digunakan oleh politisi dan aktivis untuk menyampaikan pesan mereka (Fitriani et al., 2022).

Era digital memungkinkan orang untuk lebih mudah mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam politik. Kaum milenial telah menggunakan media sosial sebagai alat yang berguna untuk mengorganisir aksi sosial dan terlibat dalam diskusi politik. Mereka dapat menyuarakan pendapat dan mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya melalui kampanye digital dan petisi online. Kampanye seperti #ReformasiDikorupsi menunjukkan bagaimana generasi milenial dapat mendorong masalah sosial dan politik Indonesia di seluruh dunia. Namun, era digital juga membawa tantangan, salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Informasi palsu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, menimbulkan kebingungan dan polarisasi di kalangan milenial, menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dalam pendidikan politik. Studi menunjukkan bahwa generasi milenial di Indonesia lebih rentan terhadap berita palsu karena kecenderungan mereka untuk membaca berita melalui media sosial daripada sumber berita konvensional.

Selain itu, polarisasi opini juga menjadi tantangan di era digital. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang dapat menyebabkan polarisasi opini. Kaum milenial di Indonesia mungkin hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, yang mengurangi keterbukaan mereka terhadap pandangan berbeda. Filter bubbles dan echo chambers memperparah situasi ini, membuat diskusi politik menjadi kurang inklusif dan lebih terpolarisasi. Secara keseluruhan, era digital membawa dampak besar bagi pendidikan politik, baik positif maupun negatif. Akses informasi yang lebih mudah dan partisipasi politik yang lebih aktif merupakan keuntungan yang signifikan, namun tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan polarisasi

opini juga perlu diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih melek politik dan inklusif.

Tantangan dalam Pendidikan Politik di Era Digital

Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital, ketergantungan pada media sosial sebagai sumber informasi utama, dan kurikulum pendidikan politik yang belum responsif terhadap perkembangan teknologi. Rendahnya kemampuan memilah informasi membuat milenial rentan terpapar berita palsu. Algoritma media sosial memperkuat bias dan polarisasi, sementara pendidikan politik formal sering bersifat teoretis dan kurang relevan dengan dinamika politik kontemporer.

Pendidikan politik di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang inovatif dan menyeluruh (Malik et al., 2020). Salah satu tantangan utama adalah literasi digital yang rendah di kalangan milenial. Meskipun mereka sangat akrab dengan teknologi, literasi digital mencakup kemampuan untuk mengevaluasi keandalan sumber informasi, memahami bias dalam konten online, serta mengidentifikasi berita palsu. Penelitian menunjukkan bahwa banyak milenial di Indonesia kesulitan membedakan antara berita yang valid dan berita palsu. Kondisi ini menekankan perlunya program pendidikan literasi digital yang lebih baik, yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum formal serta melalui kampanye publik yang luas.

Ketergantungan yang tinggi pada media sosial untuk mendapatkan informasi politik adalah tantangan lain yang signifikan. Media sosial menjadi sumber utama berita bagi banyak milenial, namun informasi yang tersebar di platform ini seringkali tidak terverifikasi dan bias. Media sosial juga cenderung memprioritaskan isu-isu sensasional yang mungkin tidak memiliki relevansi politik yang mendalam, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang memerlukan perhatian lebih serius. Selain itu, algoritma media sosial cenderung membentuk filter bubbles dan echo chambers, yang membatasi paparan milenial terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat polarisasi opini. Kurangnya pendidikan politik formal yang memadai di Indonesia juga menjadi masalah serius. Kurikulum sekolah seringkali tidak mencakup pendidikan politik yang komprehensif dan relevan dengan situasi politik saat ini. Banyak siswa tidak mendapatkan pengetahuan dasar tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi aktif dalam proses politik. Pendidikan politik yang ada seringkali bersifat teoretis dan tidak menarik bagi kaum milenial, yang mengakibatkan kurangnya minat dan pemahaman mereka terhadap isu-isu politik yang penting.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak. Pertama, literasi digital harus ditingkatkan melalui program-program edukasi yang mengajarkan cara mengevaluasi sumber informasi, memahami bias, dan mengidentifikasi berita palsu. Program-program ini bisa dilakukan melalui sekolah, universitas, serta melalui kampanye publik yang melibatkan media massa dan organisasi non-pemerintah. Kedua, ketergantungan pada media sosial harus diimbangi dengan promosi sumber informasi yang lebih kredibel dan terverifikasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menyediakan platform informasi yang dapat diandalkan dan mudah diakses oleh milenial. Selain itu, media sosial juga bisa didorong untuk memperbaiki algoritma mereka agar lebih memprioritaskan konten yang informatif

dan mendidik. Ketiga, reformasi pendidikan politik formal diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum sekolah mencakup pendidikan politik yang komprehensif dan relevan. Kurikulum ini harus diajarkan dengan metode yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelas, simulasi, dan proyek-proyek yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan politik. Selain itu, pelatihan bagi guru juga penting agar mereka dapat mengajar pendidikan politik dengan cara yang efektif dan menarik. Keempat, keterlibatan langsung kaum milenial dalam kegiatan politik dan sosial harus didorong. Program magang, proyek komunitas, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada isu-isu politik dan sosial dapat membantu milenial mendapatkan pengalaman langsung dan memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, tantangan dalam pendidikan politik di era digital dapat diatasi. Ini akan menghasilkan generasi milenial yang lebih kritis, terinformasi, dan aktif dalam kehidupan politik, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Politik Kaum Milenial

Faktor penentu pendidikan politik milenial antara lain peran media sosial, kampanye politik digital, sistem pendidikan formal, pengaruh keluarga dan komunitas, serta kondisi ekonomi dan sosial. Media sosial berperan ganda sebagai sumber informasi dan ruang debat politik, tetapi juga menjadi saluran disinformasi. Pendidikan politik yang kontekstual, dukungan keluarga yang terbuka terhadap dialog politik, dan kesadaran atas isu sosial-ekonomi dapat meningkatkan keterlibatan politik generasi muda

Pendidikan politik kaum milenial di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berinteraksi. Salah satu faktor utama adalah peran media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan Saud (2021), platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memainkan peran besar dalam membentuk pandangan politik kaum milenial. Selain menyediakan informasi, media sosial juga menjadi tempat diskusi dan debat politik. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media sosial akurat dan tidak bias. Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, sering mempromosikan konten sensasional atau kontroversial yang dapat memperburuk polarisasi politik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi krusial agar kaum milenial dapat memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoaks. Kampanye politik digital juga merupakan faktor signifikan dalam pendidikan politik kaum milenial. Kampanye politik modern di Indonesia semakin beralih ke platform digital untuk menjangkau pemilih muda. Kampanye ini menggunakan data analitik untuk menargetkan iklan politik secara spesifik kepada individu berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini dapat meningkatkan partisipasi politik dengan membuat pesan-pesan politik lebih relevan dan menarik bagi kaum milenial, ada juga risiko manipulasi dan penyebaran disinformasi. Kampanye politik di Indonesia sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang kontroversial dan memecah belah, yang dapat mempengaruhi pandangan politik kaum milenial secara negatif. Pengawasan dan regulasi terhadap konten politik di media sosial menjadi penting untuk memastikan kampanye yang etis dan informatif.

Sistem pendidikan formal juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman politik kaum milenial. Namun, kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali kurang fleksibel untuk memasukkan perkembangan politik terbaru dan isu-isu kontemporer yang relevan. Banyak sekolah masih mengandalkan buku teks yang ketinggalan zaman, sementara pendekatan interaktif dan berbasis teknologi masih jarang diterapkan. Pendidikan politik yang relevan dan menarik harus mencakup materi yang sesuai dengan kondisi politik saat ini dan menggunakan metode pengajaran yang melibatkan kaum muda secara aktif. Freire (2007) menegaskan bahwa integrasi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah harus didukung oleh pelatihan bagi guru untuk mengajarkan materi politik dengan cara yang menarik dan efektif. Pengaruh keluarga dan komunitas juga tidak bisa diabaikan. Nilai dan pandangan politik sering kali diturunkan dari keluarga dan komunitas tempat seseorang tumbuh. Kaum milenial yang tumbuh dalam lingkungan yang aktif secara politik cenderung lebih terlibat dalam politik. Namun, era digital memungkinkan kaum milenial untuk mengeksplorasi pandangan politik yang berbeda dari yang diajarkan di rumah, menciptakan dinamika baru dalam pembentukan identitas politik. Mereka dapat mengakses berbagai sumber informasi dan perspektif, yang dapat memperluas wawasan politik mereka dan membentuk pandangan yang lebih kritis. Lingkungan keluarga dan komunitas yang mendukung dialog terbuka dan inklusif akan memperkaya pendidikan politik kaum milenial.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam pendidikan politik kaum milenial. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketimpangan sosial dapat mempengaruhi pandangan politik dan tingkat partisipasi politik kaum milenial. Kesadaran akan isu-isu sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dapat mendorong kaum milenial untuk lebih aktif terlibat dalam politik sebagai upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Untuk menciptakan generasi milenial yang lebih melek politik dan kritis, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas, dengan program-program edukasi yang mengajarkan cara mengevaluasi sumber informasi, memahami bias, dan mengidentifikasi berita palsu. Reformasi pendidikan politik formal harus dilakukan untuk memastikan kurikulum mencakup perkembangan politik terbaru dan menggunakan metode pengajaran yang menarik bagi kaum muda. Selain itu, promosi dialog yang inklusif dan konstruktif di media sosial serta pengawasan terhadap konten politik di platform digital akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pendidikan politik kaum milenial dapat ditingkatkan untuk menghasilkan generasi yang lebih kritis, terinformasi, dan aktif dalam kehidupan politik. Ini pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan kaum milenial berperan sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi kebijakan publik dan membawa kemajuan bagi negara.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Pendidikan Politik di Era Digital

Penguatan pendidikan politik milenial di era digital memerlukan integrasi literasi digital dalam kurikulum, pemanfaatan platform e-learning dan aplikasi interaktif, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan ruang diskusi politik yang sehat di media sosial. Pengawasan konten politik digital, promosi jurnalisme yang bertanggung

jawab, dan program partisipasi politik seperti magang di lembaga pemerintahan juga penting untuk membentuk generasi milenial yang kritis, melek informasi, dan aktif berpolitik

Peningkatan pendidikan politik di era digital memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan beragam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil. Salah satu langkah kunci adalah integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk mengajarkan siswa cara mengevaluasi sumber informasi, mengenali berita palsu, dan memahami cara kerja algoritma media sosial. Literasi digital juga harus mencakup keterampilan menggunakan alat digital untuk advokasi politik dan partisipasi dalam proses demokratis, sehingga kaum milenial tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga kontributor aktif dalam diskusi politik. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan politik melalui berbagai platform e-learning, webinar, dan aplikasi pendidikan interaktif yang menyediakan informasi valid dan terverifikasi tentang politik dan kebijakan publik. Misalnya, aplikasi seperti ICivics (n.d.) di Amerika Serikat menggunakan permainan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan kepada kaum muda. Di Indonesia, pengembangan aplikasi serupa yang disesuaikan dengan konteks lokal dapat membantu meningkatkan pemahaman politik di kalangan milenial, sekaligus membuat pembelajaran politik lebih menarik dan interaktif.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat memainkan peran penting dalam mendidik kaum milenial tentang politik. Program-program seperti workshop, seminar, dan diskusi publik dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi kaum milenial. Organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan sumber daya pendidikan yang independen dan tidak bias, yang membantu mengimbangi bias dalam media digital. Kerjasama antara sekolah, universitas, dan Organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pendidikan politik, memastikan bahwa kaum milenial mendapatkan perspektif yang beragam dan kritis tentang isu-isu politik. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik yang valid. Promosi jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh kaum milenial akurat dan tidak bias. Dukungan terhadap media independen dan pendidikan jurnalisme yang kuat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari berita palsu dan bias media. Media juga harus didorong untuk menyediakan platform bagi diskusi politik yang konstruktif dan inklusif, yang dapat memperkaya pemahaman politik kaum milenial. Pengembangan platform digital khusus untuk pendidikan politik juga merupakan solusi efektif. Platform ini dapat menyediakan informasi yang komprehensif dan terverifikasi tentang berbagai isu politik, serta alat interaktif yang memungkinkan kaum milenial untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik. Misalnya, platform seperti "Vote Smart" menyediakan informasi detail tentang kandidat politik dan isu-isu yang mereka dukung. Di Indonesia, platform serupa yang disesuaikan dengan konteks lokal dapat membantu kaum milenial mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi, serta memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi politik.

Program-program yang mendorong partisipasi politik kaum muda, seperti beasiswa politik, magang di lembaga pemerintahan, dan proyek-proyek pelayanan masyarakat, juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan kaum milenial dalam

politik. Program-program ini memberikan pengalaman praktis yang dapat melengkapi pendidikan politik formal dan non-formal, membekali kaum milenial dengan wawasan praktis dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Pengalaman langsung dalam dunia politik dan pemerintahan akan membekali kaum milenial dengan wawasan praktis yang penting dan motivasi untuk terus terlibat dalam politik. Kampanye kesadaran publik yang menekankan pentingnya literasi digital dan partisipasi politik juga dapat membantu membangun budaya politik yang lebih sehat di kalangan kaum milenial. Kampanye ini bisa melibatkan influencer media sosial dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya keterlibatan politik yang bertanggung jawab dan informatif. Kampanye kesadaran yang kreatif dan menarik dapat menjangkau lebih banyak milenial dan memotivasi mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh-tokoh populer dan berpengaruh di media sosial dapat memperluas jangkauan dan dampak kampanye ini, memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, pendidikan politik di era digital dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan generasi milenial yang lebih kritis, terinformasi, dan aktif dalam kehidupan politik. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan kesejahteraan sosial di Indonesia, dengan kaum milenial memainkan peran sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi kebijakan publik dan membawa kemajuan bagi negara. Peningkatan partisipasi politik kaum milenial juga akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Era digital telah membuka peluang besar bagi generasi milenial di Indonesia untuk mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan terlibat aktif dalam kampanye serta gerakan sosial berbasis teknologi. Media sosial menjadi ruang utama bagi pertukaran gagasan politik yang cepat dan interaktif, namun juga memunculkan tantangan serius berupa penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan rendahnya literasi digital.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan politik milenial memerlukan langkah strategis yang mencakup integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal, pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran politik yang interaktif, peningkatan kapasitas guru dan fasilitator, serta pengembangan ekosistem informasi politik yang valid dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membentuk generasi milenial yang kritis, melek informasi, dan bertanggung jawab dalam partisipasi politik, sehingga dapat memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia..

REFERENSI

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (B. A. Saebani (Ed.); 1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Chan, C. K. Y. (2023). The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers? *Smart Learning Environments*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00269-3>
- Chan, M. (2021). Cross-Cutting Discussion on Social Media and Online Political Participation: A Cross-National Examination of Information Seeking and Social Accountability Explanations. *Social Media and Society*, 7(3). <https://doi.org/10.1177/205630512111035697>
- Fitriani, L., Aminudin, I., & Rengi, P. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Generasi Milenial. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 46–55. <https://doi.org/10.35760/mkm.2022.v6i1.6517>
- Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Terjemahan). PUSTAKA PELAJAR.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Kamdani (Ed.); 6th ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- iCivics*. (n.d.). <https://www.icivics.org/>
- Ida, R. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: a comparative study of Indonesia and Pakistan. *Quality and Quantity*, 54(4), 1285–1297. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9>
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A. L., & Hamrun, H. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>
- Sahara, W. (2021). *Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/10420161/menilik-kembali-aksi-reformasidikorupsi-dua-tahun-lalu?page=all>
- Saud, M. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Theocharis, Y. (2023). Platform affordances and political participation: how social media reshape political engagement. *West European Politics*, 46(4), 788–811. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410>
- Valenzuela, S. (2021). The Personal Is the Political? What Do WhatsApp Users Share and How It Matters for News Knowledge, Polarization and Participation in Chile. *Digital Journalism*, 9(2), 155–175. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1693904>